

OMBUDSMAN SULBAR SARANKAN PEMPROV PERSIAPKAN KOMUNIKASI KRISIS WABAH VIRUS CORONA

Senin, 27 Januari 2020 - I Komang Bagus

Mamuju - Tim Ombudsman RI Sulawesi Barat akan segera melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Sulbar membahas *provincial briefing* dan *call tree* kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan penanganan virus corona.

Meski belum ada data dengan jumlah signifikan mengenai warga terjangkit wabah virus corona, namun pemerintah perlu berancang-ancang menyiapkan *crisis center*, mengingat mobilisasi manusia dari China ke Indonesia atau sebaliknya cukup tinggi termasuk ke wilayah Sulawesi Barat.

Hal itu disampaikan Lukman Umar kepala perwakilan Ombudsman RI Sulbar saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (27/01/20).

Lukman menambahkan, berdasarkan data statistik jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Indonesia mencapai 32.209 jiwa pada tahun 2018 dengan ciri khas terkonsentrasi pada wilayah-wilayah proyek maupun perkantoran perusahaan multinasional asal China.

Menurutnya tidak mudah mendapatkan data statistik mutakhir mengenai tenaga kerja asal Indonesia yang berada di China. Beberapa sumber seperti The World Bank dan BPS menyebutkan dari 9 juta Tenaga Kerja Asal Indonesia di luar negeri, ada 10% atau lebih kurang 900.000 jiwa di China.

Ombudsman Republik Indonesia mengapresiasi upaya *screening* lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Lebih jauh, Ombudsman memandang perlu segera dilakukan hal-hal berikut: menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan segera jika wabah mulai meluas dan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona.

Mengkaji ulang kesepakatan-kesepakatan investasi yang mensyaratkan penggunaan tenaga kerja asing asal China dan menyiapkan skema mitigasi. Ini penting untuk mengantisipasi risiko meluasnya wabah virus corona di area-area proyek investasi asal China dan mengurangi dampak ekonomis akibat terganggunya aktivitas investasi.

Mengidentifikasi dan menyiapkan skema perlindungan bagi penduduk Indonesia yang berada di China, baik pekerja migran, pelajar, dan lainnya, maupun di wilayah negara lain yang terindikasi terkena serangan (*suspected country*).

Segera menyesuaikan standar pelayanan, termasuk terhadap BPJS, untuk memastikan pasien terjangkit wabah tetap dapat terlayani.

Melakukan pemutakhiran berkala dan mempublikasikan perkembangan keadaan berdasarkan tingkat kedaruratan, terutama di area-area rawan, agar bisa memberikan kewaspadaan dan ketenangan bagi publik.

Ombudsman juga memandang Pusat Komunikasi Krisis perlu segera disiapkan karena publik penting mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat/hoax. Informasi publik agar dikelola sumber tunggal dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya belum jelas.